



Kejagung Cekal 10 Orang Terkait Kisruh Jiwasraya

Diduga Terlibat Perkara Korupsi

JAKARTA, SP - Bagaikan bola salju, kisruh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kian besar menyeret banyak pihak. Kini, Kejaksanaan Agung melakukan upaya cegah dan tangkal (cekal) terhadap 10 orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi di asuransi pelat merah tersebut.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus pada Kejagung, Adi Toegarisman mengatakan bahwa 10 orang yang telah dicekal itu berasal dari unsur PT Asuransi Jiwasraya dan pihak swasta.

"Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, tadi malam kita sudah minta ke pihak terkait untuk mencekal 10 orang berinisial HR, DYA, HP, MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT dan AS," tuturnya, Jumat (27/12).

Adi menjelaskan alasan tim penyidik mencekal 10 orang tersebut, lantaran semuanya diduga terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp13,7 triliun di PT Asuransi Jiwasraya.

"Semuanya diduga terlibat, maka dari itu dilakukan

upaya cekal," katanya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan negara berpotensi rugi sebesar Rp13,7 triliun akibat Jiwasraya telah berinvestasi pada 13 perusahaan bermasalah.

Burhanuddin menilai bahwa PT Asuransi Jiwasraya diduga melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi melalui investasi pada aset dengan risiko tinggi untuk mengejar high return.

Secara terpisah, Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko membeberkan sejumlah portofolio saham yang berkinerja rendah. Perseroan tidak dapat melikuidasi aset saham karena nilainya terlampau rendah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Hexana menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 160 portofolio investasi saham dan reksa dana saham yang dimiliki Jiwasraya. Perseroan tercatat berinvestasi langsung pada 26 perusahaan dan sisanya pada reksa dana saham.

Hexana membeberkan beberapa saham yang masih dimiliki Jiwasraya di anta-

ranya di PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), PT SMR Utama Tbk. (SMRU), PT PP Properti Tbk. (PPRO), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI).

Selain itu, penempatan tidak langsung di antaranya ada di PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. (PCAR), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. (JGLE), PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA), dan PT Trada Alam Minerale Tbk. (TRAM).

"Per 26 Desember 2019, saham nilainya tinggal Rp1,5 triliun dan reksa dana saham tinggal Rp4 triliun, dari harga perolehan [saham] Rp5,6 triliun dan [reksa dana] Rp12,7 triliun," ujar Hexana pada Jumat (27/12).

Dia menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut masih terdapat sisa impairment atau perkiraan penurunan nilai hingga Rp1,2 triliun.

Hal tersebut membuat perseroan kesulitan untuk melikuidasi aset saham yang porsinya mencapai separuh dari aset finansial.

Hexana pun menjelaskan bahwa perseroan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya agar saham-saham tersebut dapat dijual. Kementerian BUMN menargetkan untuk menjual saham tersebut saat nilainya mencapai Rp5,6 triliun.



Adi Toegarisman
Jaksa Agung Muda Bidang
Pidana Khusus

Untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, tadi malam kita sudah minta ke pihak terkait untuk mencekal 10 orang berinisial HR, DYA, HP, MZ, DW, GLA, ERN, HH, BT dan AS



TEMPO

JIWASRAYA – seorang warga melintas di depan kantor PT Asuransi Jiwasraya (Persero. Polemik gagal bayar perusahaan asuransi milik negara ini berujung dicekalnya 10 orang yang diduga terlibat dugaan korupsi dalam kasus ini.

Jiwasraya tidak dapat melakukan cut loss meskipun saham-saham tersebut tidak menunjukkan pertumbuhan kinerja. Hal tersebut karena proses cut loss dapat menimbulkan kerugian negara.

“Cut loss itu boleh sepanjang sudah ada kebijakan internal, tidak ada indikasi fraud. Kalau ada indikasi fraud [dalam proses cut loss] dapat dikategorikan sebagai kerugian negara,” ujar

Hexana.

Dia menjabarkan bahwa penempatan investasi pada saham dan reksa dana saham dengan volatilitas tinggi merupakan implikasi dari meningkatnya pendapatan premi produk JS Plan. Produk tersebut memberikan proteksi selama 5 tahun dengan iming-iming imbal hasil 9%–13% dalam satu tahun.

Pada 2013, premi JS

Plan tercatat senilai Rp1,08 triliun atau 18,7% dari total premi sebesar Rp5,77 triliun. Porsi premi JS Plan terus melonjak hingga pada 2017 mencapai Rp16,54 triliun atau 75,3% dari total premi senilai Rp21,91 triliun.

Premi JS Plan yang menjadi dominan membuat perseroan terbebani tanggung jawab pembayaran imbal hasil setiap tahunnya. Hal

tersebut membuat Jiwasraya menempatkan investasi pada instrumen saham dan reksa dana saham untuk mengejar imbal hasil tinggi, tetapi gagal dan hasilnya rugi.

“Jiwasraya agresif menaruh [investasi di] saham pada 2014, 2015, 2016, 2017 karena menjanjikan imbal hasil tinggi itu, tujuannya memang mengincar return,” ujar Hexana. **(bis/jee)**